



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kebijakan ...

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN MUATAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

Bagian Kedua
Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
 - c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
- (4) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 17

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023	II-1
2.1. Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Daerah...	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	II-65
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	II-73
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-80
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	II-91
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....	III-7
3.3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	III-10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	II-10
Tabel 2.2	Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2023...	II-63
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023.....	II-71
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bogor.....	II-82
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bogor	II-93
Tabel 3.1	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-3
Tabel 3.2	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025.....	III-4
Tabel 3.3	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	III-6
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025	III-9
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	III-17

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, baik dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, maupun periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yang penyusunannya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan sekretariat daerah di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan, yang tertuang dalam Renja Sekretariat Daerah ini, diharapkan telah bersinergi dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat Kabupaten Bogor, maupun antar tingkatan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan secara simultan dengan mengacu pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Upaya-upaya pencapaian target IKU daerah dan target indikator kinerja Sekretariat Daerah diantaranya mengacu pada hasil evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2023, sehingga langkah-langkah yang ditempuh di tahun 2025 dapat dilakukan secara tepat hasil dan tepat guna.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan Kebijakan Nasional serta Daerah tahun 2025, yang termuat di dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025. Keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi Jawa Barat dengan kewenangan perangkat daerah dengan mempedomani program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
2. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
4. Tahapan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
6. Tahapan Penetapan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan melihat kesesuaian dengan Renja K/L, diantaranya Renja Kementerian yang berhubungan dengannya, yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk di Kementerian Dalam Negeri adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, provokatif dan inovatif, hal ini menjadi rujukan untuk penatakelolaan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sekretariat Daerah. Sedangkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sehubungan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berfokus pada peningkatan tata Kelola pemerintahan sehingga diharapkan prioritas pembangunan tahun 2025 yang didukung oleh perangkat daerah dapat terealisasi dengan optimal.

1.2 Landasan Hukum

Aturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkaran Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
33. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 31).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Tujuan disusunnya Renja adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2025.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUAPPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023
 - 2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
 - 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
 - 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah
- V. Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Sekretariat Daerah Tahun 2023

2.1. Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Daerah

2.1.1. Gambaran Umum Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan gambaran pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 mengalami perubahan pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra yaitu pada periode Renstra tahun 2021. Perubahan Renstra tersebut dilakukan dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan atas Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dapat terlihat pada capaian atas target pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, Sekretariat Daerah memiliki 3 (tiga) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan, dan 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan, dengan evaluasi atas Program/Kegiatan Sekretariat Daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan di Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp32.172.528.436,-;
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp10.613.069.622,-;

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp95.221.764.781,-.
2. Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 133.805.463.499,- dari total rencana anggaran sebesar Rp138.007.362.839,- atau terealisasi sebesar 96,96 %.
3. Realisasi kinerja Sekretariat Daerah dari keseluruhan target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat Daerah, secara umum telah memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 101,39%.

2.1.2. Kinerja Anggaran dan Kendala Sekretariat Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan tercapai dengan baik dan dilihat dari pencapaian realisasi anggaran mencapai 96,96%. Hal ini bukan berarti target tidak tercapai tetapi disebabkan adanya beberapa Permasalahan/kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara umum adalah :

1. Dalam rangka menjalankan fungsi Sekretariat Daerah sebagai coordinator dalam rangka mewujudkan hubungan kerja dan untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien antar perangkat daerah serta dalam rangka upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan SKPD, selama tahun anggaran 2023 pelaksanaannya kurang maksimal dan belum dilaksanakan secara efektif, konsisten dan berkesinambungan.
2. Belum optimalnya koordinasi antara Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah maupun sebaliknya sesuai dengan fungsi pengkoordinasiannya.
3. Dalam rangka pemenuhan entitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun anggaran 2023, masih belum optimal sehingga target pencapaian *outcome* tidak maksimal, hal ini dapat tercermin pada capaian hasil evaluasi di akhir tahun anggaran dan dalam hal ini masih terdapat informasi strategis antar SKPD yang terputus.

4. Dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah optimalisasi penyerapan anggaran belum dapat dimaksimalkan, mengingat terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang membutuhkan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan antara *time schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
6. Belum optimalnya SDM Aparatur dan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam tiap sub kegiatan.
7. Masih terbatasnya tenaga teknis baik secara kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya sehingga belum ada kesamaan persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan.
8. Kurang memadainya jumlah ASN yang berkompeten dan sarana/prasarana penunjang sedangkan intensitas pekerjaan cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas sekretariat untuk menunjang tugas dan fungsinya.
9. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan di Sekretariat Daerah dan beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD karena rentang waktu pelaksanaan kegiatan singkat, menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut.
10. Adanya kebutuhan anggaran yang sebelumnya tidak teranggarkan, tetapi ada pengajuan permohonan bantuan atau kebutuhan lain seperti penyediaan makanan dan minuman.
11. Perubahan Anggaran disahkan pada Triwulan IV sehingga dalam menyusun jadwal kegiatan melalui LS waktunya terbatas.
12. Kurangnya informasi tentang data pendukung yang diperlukan saat rapat pembahasan evaluasi Program Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga hanya memfokuskan pada hal-hal yang penting saja.
13. Tingginya Intensitas beban kerja dan konflik kerja pada ASN/pegawai sehingga menurunkan kinerja ASN/pegawai sehingga diperlukan adanya anggaran kegiatan sinergitas

bagi pegawai sebagai bagian dari upaya membangun kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal serta mengkompensasikan kelemahan.

2.1.3. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi dan melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari keseluruhan capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023, secara rinci capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Selain capaian kinerja yang tidak memenuhi target pada pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 terdapat juga indikator kinerja yang secara pencapaian kinerjanya melebihi dari target.

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tidak Mencapai target:
 1. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator kinerja “Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani”, dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 4 (empat) Dokumen, hanya ter-realisis sebanyak 3 (tiga) Dokumen atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 75%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini di sebabkan karena pada pelaksanaan anggaran tahun 2023, sub kegiatan “Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” yang rencananya akan dilaksanakan menjadi tidak

dilaksanakan pada perubahan anggaran 2023 atas permintaan pimpinan.

Sebagai perbaikan di masa yang akan datang, untuk pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan pimpinan perlu untuk dikomunikasikan kepada pimpinan dengan lebih intens.

2. Pada Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Dokumen, hanya ter-realisasi sebanyak 2 (dua) Dokumen atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 66,67%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena pada indikator “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” ditargetkan 3 (tiga) dokumen yaitu dokumen laporan perjalanan dinas dalam kota, dokumen laporan perjalanan dinas biasa, dan dokumen laporan perjalanan dinas luar negeri. Dikarenakan pada tahun 2023 perjalanan dinas luar negeri tidak diselenggarakan, sehingga tidak ada laporan yang dapat dibuat.

Sebagai perbaikan di masa yang akan datang, untuk target pada sub kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” akan dilakukan penyesuaian kembali jika tidak ada anggaran pada perjalanan dinas yang rencananya akan dilaksanakan.

3. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 300 orang, hanya ter-realisasi sebanyak 245 orang atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 81,67%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena pada indikator “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” dari target 300 orang yang menerima gaji dan tunjangan, jumlah ASN lingkup Sekretariat Daerah hanya sebanyak 245 orang.

Sebagai perbaikan di masa yang akan datang, untuk target pada sub kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” akan dilakukan penyesuaian kembali dengan menggunakan prediksi total ASN lingkup Sekretariat Daerah yang akan dibayarkan gajinya pada tahun anggaran berjalan.

4. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 12 paket dimana paket layanan yang dilakukan adalah perbulan layanan hanya ter-realisasi sebanyak 4 Paket, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 33,33%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena pada indikator “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah” disebabkan karena pelantikan Plt. Bupati Bogor sebagai Bupati Bogor Definitif dilakukan pada bulan September 2023, sehingga bulan layanan yang dapat diselenggarakan hanya 4 Bulan.

Sebagai perbaikan di masa yang akan datang, untuk target pada sub kegiatan “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah” akan dilakukan penyesuaian kembali dengan melihat kebutuhan penyelenggaraan layanan pimpinan menyesuaikan dengan kondisi Kepda dan Wakepda pada tahun anggaran berjalan.

5. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 12 paket dimana paket layanan yang dilakukan adalah perbulan layanan hanya ter-realisasi sebanyak 8 Paket, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 66,67%.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena pada indikator “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah” disebabkan karena pelantikan Plt. Bupati Bogor sebagai Bupati Bogor Definitif dilakukan pada bulan September 2023, sehingga bulan layanan yang dapat

diselenggarakan selama Plt. Bupati Bogor berstatus sebagai Wakil Bupati Bogor hanya 8 Bulan.

Sebagai perbaikan di masa yang akan datang, untuk target pada sub kegiatan “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah” akan dilakukan penyesuaian kembali dengan melihat kebutuhan penyelenggaraan layanan pimpinan menyesuaikan dengan kondisi Kepda dan Wakepda pada tahun anggaran berjalan.

b. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Melebihi Target:

1. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan indikator kinerja “Jumlah peraturan perundang - undangan yang diterbitkan” dan indikator “Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 395 Dokumen dan 35 Perkara, telah ter-realisis sebanyak 464 Dokumen dan 59 Perkara atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 117,47% dan 168,57%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan realisasi pada indikator “Jumlah peraturan perundang - undangan yang diterbitkan” dan “Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya” dipengaruhi oleh banyaknya permohonan pembentukan kebijakan dan juga banyaknya permintaan bantuan hukum.

2. Pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 34 Kerjasama telah terealisasi sebanyak 82 Kerjasama atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 241,18%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan banyaknya permohonan Kerjasama yang ditindaklanjuti dan juga pembaruan Kerjasama dari hasil evaluasi Kerjasama yang sebelumnya telah dilakukan.

3. Pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja “Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah” dari target indikator sebesar 96% telah terealisasi sebesar 97,84%, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 101,92%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mendorong SKPD di lingkungan Kabupaten Bogor untuk dapat melakukan tender dini. Dengan pelaksanaan tender yang dilakukan lebih cepat, dapat mengurangi potensi tidak dilaksanakannya lelang karena keterbatasan waktu.

4. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan indikator kinerja “Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun” dari target indikator sebanyak 395 Produk Hukum telah terealisasi sebanyak 464 Produk Hukum, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 117,47%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan banyaknya permohonan pembentukan kebijakan.

5. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja “Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum” dari target indikator sebanyak 35 Kasus telah terealisasi sebanyak 59 kasus, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 168,57%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan banyaknya permohonan penyelesaian perkara yang ditangani.

6. Pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator kinerja “Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi” dari target indikator sebanyak 395 Produk Hukum telah terealisasi sebanyak 440 Produk Hukum yang

terdokumentasi, atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 111,39%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan banyaknya peraturan perundangan yang ditetapkan.

7. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri” dari target Kinerja tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 34 Kerjasama telah terealisasi sebanyak 82 Kerjasama atau capaian pada indikator ini adalah sebesar 241,18%.

Ketercapaian kinerja pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan banyaknya permohonan Kerjasama yang ditindaklanjuti dan juga pembaruan Kerjasama dari hasil evaluasi Kerjasama yang sebelumnya telah dilakukan.

Secara rinci, realisasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada akhir periode pelaksanaan Renstra 2018-2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

URUSAN / UNSUR : Unsur Penunjang
 BIDANG URUSAN : Sekretariat Daerah
 PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	40	01	11		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)	Nilai	3,26						
				0001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	LPPD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018	Dok.	1						
				0002	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dok.	1						
				0003	Perumusan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Serta Presiden dan Wakil Presiden	Dok.	1						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0004	Pengelolaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten		Jumlah Dokumen Laporan Unit Satuan Tugas Saber Pungutan Liar	Dok.	1						
	40	01	12		Program Peningkatan Pembinaan Wilayah		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan diatas 75	Persen	65						
				0001	Penyusunan Pedoman Teknis Pengaturan Kecamatan dan Kelurahan		Draft Perbup/Kepbup Tentang Pengaturan Kecamatan dan Kelurahan	Draft	1						
				0002	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	6						
	40	01	13		Program Penataan Wilayah		Persentase penyelesaian kasus tanah	Persen	70,25						
				0001	Penataan Batas Wilayah Kabupaten Bogor		Jumlah Titik Batas Kecamatan	titik	50						
							Peta Batas Kecamatan	Peta	1						
				0002	Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Pertanahan		Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Pertanahan	Dok.	10						
				0003	Kajian Pengembangan Wilayah		Jumlah Kajian Pengembangan Wilayah Kecamatan	Kajian	1						
	40	01	14		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Jumlah DOB	DOB	0						

[illegible]

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		40	01	17		Program Penyuluhan Hukum	Persentase Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat	Persen	100						
					0001	Penyuluhan Hukum Terpadu (PHT)	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Terpadu	kali	40						
							Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum Terpadu	peserta	40						
					0002	Peyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manuasi di Kabupaten Bogor	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan RAN HAM	kali	2						
							Jumlah Peserta Penyuluhan RAN HAM	orang	300						
		40	01	18		Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Indeks Kerukunan Beragama	persen	100						
					0001	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bogor	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan MTQ Kabupaten Bogor	Keg.	1						
							Jumlah Penyelenggaraan STQ Tk. Provinsi Jawa Barat	Keg.	1						
					0002	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Keg.	7						
							Jumlah Pondok Pesantren yang Mengikuti Eco Pontren	Ponpes	46						
					0003	Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Lingkup Keagamaan	Jumlah Dialog Aspirasi Masyarakat Lingkup Keagamaan	kali	10						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0004	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan	Dok.	2						
				0005	Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Bogor	Jumlah Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bogor	kali	2						
				0006	Silaturahmi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bogor	Penyelenggaraan Silaturahmi Calon Jamaah Haji Kabupaten Bogor	kali	1						
				0007	Pengelolaan Data Hibah Sarana Keagamaan	Tersedianya Sistem Penguatan Lembaga Keagamaan Berbasis Sumber Daya Ekonomi	sistem	1						
						Tersedianya Dokumen Hasil Verifikasi, Validasi dan Monitoring Sarana Keagamaan	Dok.	1						
				0008	Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor	Dok.	1						
						Jumlah Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor yang Terkelola	mesjid	5						
				0009	Bimbingan Teknis Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan dan Sarana Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Hibah	kali	3						
	40	01	19		Program Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Persentase PHBN dan PHBD	persen	100						
				0001	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	phbn	9						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Daerah	phbd	1						
	40	01	20		Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100						
				0001	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan di Kabupaten Bogor	kali	2						
				0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Rakor Bidang Kesehatan	Kali	5						
						Penyelenggaraan Orientasi Tim Pembina UKS Kecamatan	Kali	1						
						Lomba Sekolah Sehat Tk. Kabupaten	kali	1						
				0003	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rakor Bidang Kemasyarakatan	kali	5						
				0004	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan	Pelaksanaan Rakor Bidang Kepemudaan	kali	1						
	40	01	21		Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	Persentase BUMD yang Sehat	Persen	25						
				0001	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan	Pelaksanaan Pembinaan BUMD	kali	12						
				0002	Seleksi Anggota Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Bogor	Pembentukan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor Periode Tahun 2019-2023	Kepbup	1						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pembentukan Direksi PPE Kab. Bogor	Kepbup	1						
				0003	Seleksi Anggota Dewan/Badan Pengawas/Komisaris Perusahaan Daerah di Kabupaten Bogor	Pembentukan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kab. Bogor Periode Tahun 2019-2023	Kepbup	1						
						Pembentukan Anggota Badan Pengawas PPE Kab. Bogor	Kepbup	1						
				0004	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Dunia Usaha dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen/Rumusan Kebijakan Pembangunan Industri dan Dunia Usaha	dokumen	3						
				0005	Pengoordinasian dan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan	dokumen	2						
				0006	Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bogor	dokumen	1						
	40	01	22		Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase Evaluasi Capaian Kinerja yang ditindaklanjuti	Persen	100						
				0001	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Bulanan APBD dan Kab Non APBD Kabupaten dan E-Monev	Dokumen	32						
				0002	Perumusan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program	Dok.	3						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan	dan Kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan								
				0003	Perumusan Perencanaan Administrasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Perencanaan Administrasi Kegiatan Pembangunan	Dok.	9						
						Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Standar Harga	Kali	2						
				0004	Perumusan Kebijakan. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	Dok.	12						
	40	01	23		Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	Persen	114,29						
				0001	Perumusan Bahan Kerjasama dan Perjanjian Pemerintah	Jumlah Draft/Dokumen Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Antar Pemerintah dan Luar Negeri	Draft/Dokumen	9						
				0002	Perumusan Bahan Evaluasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga	laporan	39						
				0003	Perumusan Bahan Kerjasama Non Pemerintah	Jumlah Naskah/Draft Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dengan Pihak Ketiga	Dokumen	35						
				0004	Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Daerah	kali	1						
	40	01	27		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase Proses Pelelangan sesuai usulan Perangkat daerah	Persen	100,00						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						yang dapat dilaksanakan sesuai Jadwal								
				0001	Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi yang Terpilih	Dok	721						
				0002	Pengelolaan Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya yang Terpilih	Dok	367						
				0003	Pembinaan Penyediaan Barang/Jasa	Penyelenggaraan Sosialisasi Penyediaan Barang dan Jasa	Kali	3						
				0004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dok	4						
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dok	12						
						Jumlah Dokumen Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dok	12						
	40	01	24		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Pimpinan (5=Sangat puas, 4=Puas, 3=Cukup puas, 2=Kurang Puas, 1=Tidak Puas)	Nilai	4						
				0001	Penyiapan Bahan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Dokumen laporan Penerima Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Dokumen	10						
				0002	Penyiapan Bahan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kali	40						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0003	Penyiapan Bahan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kali	75						
				0004	Pengelolaan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi	Pimpinan	2						
				0005	Pengelolaan Kegiatan Ketatausahaan Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan	Dokumen	13						
				0006	Pengendalian Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan	Kajian	66						
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Ketatausahaan Sekretariat daerah	Dok.	80						
				0007	Penyelenggaraan Protokoler	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran	Kegiatan	42						
						Jumlah Penyelenggaraan Upacara yang Diiringi oleh KORSIK Kab. Bogor	Upacara	40						
				0008	Peresmian Bangunan dan Infrastruktur Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Gedung dan Infrastruktur Pemerintah Daerah yang Diresmikan	Gedung	0						
	40	01	25		Program Pengelolaan Administrasi Aparatur	Persentase Implementasi hasil ANJAB dan ABK	persen	100						
				0001	Penyusunan Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja	Dok.	1						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0002	Penyusunan Analisis Jabatan pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan	Dok.	1						
				0003	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial ASN	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Manajerial ASN	Dok.	1						
				0004	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Dok.	1						
	40	01	26		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang Implementatif	Persen	63,63						
				0001	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Raperda/Raperbup Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Raperda/Raperbup	6						
				0002	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD yang Kompetitif dalam Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor	Dok.	1						
				0003	Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Umum Kepada Perangkat Daerah	Jumlah Raperbup Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Umum Kepada SKPD	Raperbup	2						
				0004	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pelayanan Umum Pemerintah Daerah	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah	Laporan	1		100	100			
				0005	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Supervisi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Pencapaian Pelaksanaan SPM SKPD di Kab. Bogor	Dok.	1		100	100			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0006	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil SKM SKPD	Dok.	1		100	100			
				0008	Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Sekretariat Daerah	Dok.	1		100	100			
				0009	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dok.	1		100	100			
										14	14			
	40	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Temuan Materil	temuan	19		3	3			
						Persentase aset dalam kondisi Baik	Persen	92,21		1	1			
				0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang Dibayarkan	jenis	4		1	1			
						Lamanya pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	9		1	1			
				0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayar Pajaknya	unit	111		1	1			
				0003	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Terbayarkan	Orang	69		3	3			
						Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	jenis	37		4	4			
						Lamanya Jasa Kebersihan	bulan	9		10	10			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0004	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	Orang	8		269	256			
						Lamanya pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	bulan	9		2	2			
				0021	Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	Jenis	53		2	2			
				0022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Jenis	43		1	1			
				0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang Tersedia	Jenis	5		2				
				0026	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Tamu Kantor dan Peserta Rapat	Porsi	53236		16	16			
				0027	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	kali	148		1	1			
				0041	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah Dokumentasi dan Arsip yang Tersedia	Dok,	4		3	3			
				0042	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	Dok,	7		1	1			
						Lamanya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	bulan	12		1	1			
				0044	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan	Orang	31		1	1			
						Lamanya pelayanan Keamanan Kantor		9		1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0045	Penyediaan Pelayanan Tamu Kantor	Jumlah Petugas Penerima Tamu	Orang	9		1	1			
						Lamanya pelayanan tamu Kantor		9		8	8			
				2001	Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran Jasmani di Lingkup Setda	kali	44		269	256			
				2002	Penyiapan Bahan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kali	75						
				0005	Pengelolaan Kegiatan Ketatausahaan Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan	Dokumen	13						
				0006	Pengendalian Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan	Kajian	66						
										269	256			
	40	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Temuan Materiil	temuan	19						
						Persentase aset dalam kondisi Baik	Persen	92,21		7	7			
				0042	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	unit	3			10			
				0043	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Mebeulair yang Tersedia	Set	4						
						Jumlah Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga yang Tersedia	Paket	6						
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Unit	5		9	9			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0044	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	Jenis	14		6	6		
	0045	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	Jenis	13		15	15		
	0046	Pengadaan Peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang Tersedia	Jenis	5		4	4		
	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas/Ruang yang Direhabilitasi	Rumah Dinas	1		45	45		
	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki		1		0			
	0101	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang Dipelihara	Unit	2		25169	10000		
		Jumlah Taman yang Dipelihara	Paket	1		0	10			
		Jumlah Pagar yang Dipelihara	meter	700		3	3			
	0102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Gedung	5		1	1		
		Jumlah Taman yang Dipelihara	Taman	2		0	0			
		Jumlah Pagar yang Dipelihara	Pagar	3		2	3			
	0108	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jumlah Jaringan Komputer yang Terpelihara	Jaringan	2		1	0		
	0109	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	Unit	2		0			
	0110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Unit	116		4	30		
	0111	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Jenis	4		2	2		
	0113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Gedung yang Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasinya Terpelihara	Gedung	6		4	4		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Lamanya Instalasi Jaringan Listrik Komputer dan Komunikasi Yang terpelihara	bulan	12		1	5			
	2001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang Dibayarkan	4		18	18			
		Lamanya pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	4		26	20			
	2002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayar Pajaknya	111		37	36			
	2003	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Terbayarkan	69		64	64			
		Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	jenis	37						
		Lamanya Jasa Kebersihan	bulan	4		5	5			
	2004	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	53		6	6			
	2005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	43		256	256			
	2006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang Tersedia	5		5	5			
	2007	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Tamu Kantor dan Peserta Rapat	90.500						
	2008	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan	31						
		Lamanya pelayanan Keamanan Kantor	Bulan	4						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				2009	Penyediaan Pelayanan Tamu Kantor		Jumlah Petugas Penerima Tamu	Orang	9						
							Lamanya pelayanan tamu Kantor	Bulan	4						
	40	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Temuan Materiil	temuan	19						
							Persentase aset dalam kondisi Baik	Persen	92,21		1	1			
				0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Disediakan	stell/Potong	685						
											4	4			
	40	01	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Temuan Materiil	temuan	19		12	12			
							Persentase aset dalam kondisi Baik	Persen	92,21		5	5			
				0001	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang Dikirim	orang	30		0	0			
				0003	Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kesegaran Jasmani di Lingkup Setda	kali	44		12	12			
							Jumlah Penyelenggaraan Pengajian Mingguan Lingkup Setda	kali	35						
							Jumlah Penyelenggaraan Pengajian Bulanan Bupati dengan SKPD	kali	11		3	3			
							Jumlah Penyelenggaraan Pengajian Ramadhan	kali	15		12	12			
											12	12			
	40	01	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem		Nilai AKIP	Nilai	B		12	12			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
							REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
			0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Dok.	31						
			0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	Dok.	2		13	13			
			0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Dok.	2		13	42			
			0004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dan Jenis Perencanaan Anggaran yang Tersusun	Dok.	13		4	29			
			0005	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Register SPP, Serta Laporan Rekapitulasi SPM dan SP2D yang Tersusun	Dok.	19		5	5			
					Jumlah Dokumen Laporan Pencairan Arsip Keuangan yang Tersusun	Dok.	7		1	1			
			0007	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Media yang Terselenggarakan	Media	16		1	2			
			0008	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	Dok.	4		1	1			
			0009	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	Dok.	2		1	1			
	40	01	28	Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Dokumen	23						
			0001	Pengoordinasian Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Daerah	Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	7	1	2	2			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		dalam tata kelola pemerintahan daerah								
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	1	1	1			
	0003	Pengoordinasian Pengelolaan Statistik	Dokumen	6	2	1	1			
						530	556			
400103	03	11	Program Lingkup Asisten Pemerintahan	Rumusan Kebijakan		40	95			
	0001	Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Dokumen		4	6	35			
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Wilayah	Kecamatan		0					
		Pelaksanaan Kegiatan Camat Berprestasi di Kabupaten Bogor	Kecamatan		0	100	100			
		Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi infrastruktur di Kelurahan	Kelurahan		19	100	100			
		Pelaksanaan Rakor Kecamatan dan Kelurahan	Kali		10	100	100			
	0003	Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan Wilayah	Kecamatan		3	4	4			
		Jumlah Dokumen dalam rangka pembentukan daerah persiapan	Dokumen		2	2	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pengadaan tanah untuk ibukota calon daerah baru	Lahan DOB			3	3			
							Evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan	Dokumen		14	1	1			
											20	20			
	400103	04	22		Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang- Undangan Daerah			Produk Hukum			16	8			
				0001	Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah		Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan	Raperda		11	4	19			
				0002	Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah		Produk Hukum non Perda yang diterbitkan	Produk Hukum Non Perda		476	1	1			
				0003	Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Kajian Peraturan Perundang- undangan	Kajian		29	1	1			
							Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Orang		3					
							Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Kecamatan		12	7	7			
							Jaringan Dokumentasi dan Innformasi Hukum	Produk Hukum Daerah		45	5	5			
											6	6			
	400103	05	23		Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum			Persen			5	5			
				0001	Penyelesaian Bantuan Hukum Litigasi		Pekara Perdata yang tertangani di Kabupaten Bogor	Perkara Perdata		15	1	1			
							Perkara Tata Usaha Negara yang tertangani	Perkara TUN		5	2	2			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0002	Penyelesaian Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah Bantuan Hukum Administrasi Pidana yang Tertangani	Pendampingan		15	193	250		
			Jumlah penanganan masalah hukum lainnya yang tertangani	Permasalahan		10	-	6		
	0003	Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah penyelenggaraan penyuluhan hukum	Kali		10	1	1		
			Terselenggaranya Rakor RAN HAM di Kabupaten Bogor	Dokumen		1	2	2		
			Jumlah penyelenggaraan penyuluhan RAN HAM	Kali		1				
							473	416		
400103	06	24	Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan			34	80		
	0001	Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelaksanaan penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Kegiatan		2	519	329		
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kemasyarakatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra	Dokumen		3	127	77		
							8	10		
400103	06	25	Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan		9	21			
	0001	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bogor	Qori dan Qoriah yang terpilih	Orang		53	2	45		
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Mental dan Kerohanian	Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan		5	11	7		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Pondok Pesantren yang Mengikuti Eco Pontren	Kegiatan			3	1			
	0003	Penyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Lingkup Keagamaan	Kecamatan		1	2	1			
	0004	Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Bogor	Orang			0	2			
		Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bogor	Kali			1	28			
	0005	Pengelolaan Data Hibah Sarana Keagamaan	Kecamatan		20	3	1			
		Jumlah Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Bogor	Orang		520	100	8			
	0006	Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor	Mesjid		1	100	50			
400103	07	27	Program Koordinasi Lingkup Perekonomian			42	58			
	0001	Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen		1	26	46			
		Rumusan Kebijakan BUMD	Rumusan		2	16	12			
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Dokumen		2	0	0			

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Rumusan Kebijakan pengelolaan sumber daya alam	Rumusan			8	8			
	0003	Pengoordinasian Penyelenggaraan Dunia Usaha dan Penanaman Modal	Dokumen		4					
						100	100			
400103	08	28	Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Persen			100	100		
	0001	Pengoordinasian Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen		8	100	100			
		Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Standar Harga				10	11			
	0002	Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Dokumen		1	4	4			
	0003	Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan	Dokumen		1	1	1			
						2	2			
400103	09	29	Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Persen			1	1		
	0001	Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Dokumen		10	1	5			
	0002	Penyusunan Kerjasama Non Pemerintah	Dokumen		25	1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Daerah				1	1			
				0003	Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Dokumen		6					
										3	3			
	400103	10	30		Program Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa		Persen			3	3			
				0001	Pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Laporan terkait dengan Pengoordinasian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen		8	3	3			
				0002	Pengoordinasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		3	8	2			
				0003	Pengoordinasian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa	Dokumen		12					
										97,85	97,16			
	400103	03	15		Program Pengelolaan Rumah Tangga dan Protokol Perangkat Daerah		Persen			8	91,93			
				0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis		4	8	8			
				0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	Jenis		7	12	8			
				0004	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk tamu pemerintah daerah dan pejabat negara	Porsi		77437					

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0015	Penyediaan Sewa Tempat	Kali		10	1	1			
	0030	Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen		3	1	1			
	0032	Pengelolaan Keamanan Kantor	Orang		37	3	7			
	0033	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Orang		66	1	1			
		Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	Jenis		32	1	0			
	0063	Pembangunan Penunjang Gedung Kantor	Area			1	1			
	0070	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan	unit			1	1			
	0071	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis		14					
	0072	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis		14					
	0074	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis		8					
	0075	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis		33					
		Jumlah kebutuhan barang cetakan yang tersedia	Jenis		31					
	0076	Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Gedung		6					

[illegible]

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0001	Pengoordinasian perumusan penataan kelembagaan perangkat daerah	Jumlah rumusan penataan kelembagaan perangkat daerah	Raperda/ Raperbup		6					
				0002	Pengoordinasian perumusan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah rumusan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rumusan		2					
						Jumlah dokumen ketatalaksanaan	Dokumen		3					
				0003	Pengoordinasian Penyelenggaraan ANJAB dan ABK	Jumlah dokumen penyelenggaraan ANJAB/ABK	Dokumen		10					
	400103	03	16		Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat Daerah									
				0001	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Pengadministrasian dokumen dan arsip surat masuk dan keluar di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen		4					
				0002	Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	Pengadministrasian tata usaha pimpinan	TU Pimpinan		6					
				0010	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen		20					
				0015	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Daerah	Dokumen		13					
				0020	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja dan strategis Sekretariat Daerah	Dokumen		3					
				0025	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah pelaksanaan pengajian bulanan, ramadhan dan mingguan	Kali		2					

[illegible]

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0001	Penyusunan Kajian Strategis	Dokumen Kajian Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen		20					
						Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan			20					
						Dokumen Kajian Bidang Administrasi dan Keuangan			20					
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target	Persen			100	100	100	100	100
						Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100
						Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen			100	100	100	100	100
						Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100
						Persentase Penyelenggaraan bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,	Persen			100	100	100	100	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							perlengkapan, dan rumah tangga yang terlaksana									
4	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen				14	14	14	14	100
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan Strategis Sekretariat Daerah	Dokumen				3	3			
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah							3	3	100
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen				1	1			
							Jumlah Dokumen RKA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Sekretariat Daerah							1	1	100
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen				1	1			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Sekretariat Daerah							1	1	100
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen				1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Dokumen DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil						1	1	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen			1	1			
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah						1	1	100
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKjIP, LKPJ, dan LPPD)	Dokumen			3	3			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah						3	3	100
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)	Dokumen			4	4			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4	4	100
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Dokumen			10	10	10	10	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	Pegawai			269	256		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					300	245	81,67
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi (Pengesahan SPJ, dan SPM)	Dokumen			2	2		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah					2	2	100
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Dokumen			2	2		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Daerah					2	2	100
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen			1	1		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah					1	1	100
	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	Dokumen			2		6	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen			16	16		

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah						16	16	100
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1			
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	1	100
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			3	3	3	3	100
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	1			
						Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Perubahan	Dokumen			1	1			
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah						1	1	100
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pengelolaan Barang Daerah	Dokumen			1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Laporan Pengelolaan Barang Daerah Perubahan	Dokumen			1	1			
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah						1	1	100
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data barang milik daerah di lingkup Setda	Dokumen			1	1			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan					1	1	100
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Dokumen			8	8	8	8	100
				01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Pegawai			269	256			
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					12	12	100
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkup sekretariat Daerah	Dokumen			269	256			
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					6	6	100
				05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			7	7			
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					1	1	100
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi	Pegawai							

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang							
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang Terselenggara	Dokumen			9	9	9	9	100
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Instalasi Listrik dan Telekomunikasi yang tersedia	Gedung			6	6			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	1	100
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis			15	15			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					45	45	100
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang Tersedia	Jenis			4	4			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					13	13	100
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak yang Tersedia	Jenis			45	45			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Paket					1	1	100
				06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang terfasilitasi	Porsi			99980	10000			
				08		Jumlah Penyediaan Akomodasi untuk Tamu Pemerintah Daerah	Kegiatan			10	10			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan						1	1	100
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jenis				3	3			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						3	2	66,67
					10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				1	1			
					11		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	Dokumen						1	1	100
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Dokumen				2				
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit				2				
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersedia	Dokumen				30		30	5	16,67
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis dokumen surat menyurat yang dilayani	Jenis				2	2			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						2	2	100
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan	Jenis				4	4			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	1	100
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			1	5			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	1	100
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	Jenis			18	18			
						Jumlah Tenaga Administrasi	Orang			31	20			
						Jumlah tenaga keamanan	Orang			34	36			
						Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang			62	64			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	1	100
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Dokumen			5	5	5	5	100
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit			6	6			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					6	6	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Unit			256	256			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					256	256	100
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Jenis			5	5			
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Gedung			1	1			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	1	100
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani	Dokumen			4	4	4	3	75
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan			12	12			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan					12	12	100
				02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan			5	5			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					12	12	100
				03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jenis							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
				04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan			12	12			
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan					12	12	100
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terselenggara	Dokumen			3	3	3	3	100
				01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan			12	12			
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					12	4	33,33
				02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan			12	12			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					12	8	66,67
				03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan			12	12			
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket					12	12	100
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen			13	13	12	12	100
				01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan terkait dengan Penyelenggaraan ANJAB dan ABK	Dokumen			4	42			
						Jumlah Rumusan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen			4	29			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen					8	8	100
				02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Rumusan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen			5	5			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan					5	5	100
				03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kebijakan Teknis	Dokumen			1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						2	2	100
				04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Dokumen			1	2			
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen					1	1	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi e-SAKIP	Aplikasi			1	1			
						Laporan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Dokumen			1	1			
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						2	2	100
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	Dokumen			2	2	2	2	100
				01	Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran	Dokumen			1	1	1	1	100
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Bahan Informasi pimpinan daerah	Dokumen			1	1			
							Naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersusun	Naskah			40	556			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan					1	1	100
				03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kali			40	95			
							Terlaksananya Kegiatan Publikasi	Kali			6	35			
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan					1	1	100
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100
							Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100
							Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%) 11 = (10/9) x 100%
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	01	02	2,01		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan			4	4	3	3	100
					01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah	Dokumen			2	1			
								Jumlah dokumen laporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Dokumen			3	3			
								Dokumen Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Perangkat Daerah	Dokumen			1	1			
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen					5	5	100
					02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Kegiatan Rebo Keliling Bupati/Wakil Bupati Bogor (Saba Desa)	Kecamatan			20	20			
								Jumlah kegiatan evaluasi pertanahan	Kegiatan			8	8			
								Monitoring evaluasi kelurahan	Kelurahan			19	19			
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen					3	3	100
					03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah	Dokumen			1	1			
								Jumlah Dokumen LPPD dan ILPPD	Dokumen			1	1			
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen					1	1	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
										REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	4	01	02	2,02		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat	Dokumen			7	7	7	7	100
					03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen			5	5			
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen					5	5	100
					02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Lembaga Keagamaan yang Menerima Bantuan	Lembaga			6	6			
								Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial	Dokumen			5	5			
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	Dokumen					6	6	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
				01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen hasil Pelaksanaan Pengelolaan Data Calon Penerima Hibah Sarana Keagamaan	Dokumen			1	1			
						Dokumen hasil Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Bina Mental dan Kerohanian	Dokumen			2	2			
						Jumlah Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kabupaten Bogor	Lembaga			192	250			
						Pelaksanaan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Besar Kabupaten Bogor yang terkelola	Masjid			8	1			
						Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi	Kegiatan			2	2			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen					1	1	100
4	01	02	2,03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah peraturan perundang - undangan yang diterbitkan	Produk hukum			395	416	395	464	117,47
						Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya	Perkara			45	80	35	59	168,57
				01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Penetapan yang diterbitkan (Kepbup)	Kepbup			350	329			
						Produk Hukum Pengaturan yang diterbitkan (Perbup)	Perbup			35	77			
						Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan	Raperda			10	10			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun						395	464	117,47
				02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Perkara Perdata yang Tertangani	Perkara			10	45			
						Perkara TUN yang tertangani	Perkara			10	7			
						Dokumen Laporan Rakor RANHAM	Dokumen			1	1			
						Penyuluhan RANHAM	Dokumen			1	1			
						Penyuluhan Hukum	Dokumen			2	2			
						Bantuan Hukum di Luar Pengadilan	Perkara			15	28			
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus					35	59	168,57
				03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen			1	1			
						Kajian Peraturan Perundang-undangan	Kajian			8	8			
						Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peserta			730	50			
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi						395	440	111,39
4	01	02	2,04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan	Kerjasama			36	58	34	82	241,18
				01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pelaksanaan kerjasama Non Pemerintah Dalam Negeri	Kerjasama			22	46			
						Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Dalam Negeri	Kerjasama			12	12			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen					34	82	241,18

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Pelaksanaan Kerjasama dengan Luar Negeri	Kerjasama			2		0		
				03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Kerjasama	Dokumen			27	8	27	27	100,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana	Persen			100	100	100	100	100
							Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen			100	100			
							Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen			100	100			
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan/Dokumen			10	11	3	3	100
							Jumlah BUMD yang sehat	BUMD			4	4	4	4	100
				01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan BUMD dan BLUD	Dokumen			1	1			
							Jumlah Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD	Rumusan			2	2			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen					1	1	100
				02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Dokumen			1	1			
						Rumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian	Dokumen			1	5			
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan					1	1	100
				03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Dokumen			1	1			
						Rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Rumusan			1	1			
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen					1	1	100
4	01	03	2,02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Dokumen			3	3	3	3	100
				01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen			3	3			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah laporan hasil perumusan perencanaan administrasi pembangunan	Dokumen					3	3	100
				02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Dokumen			3	3			
						Jumlah laporan hasil perumusan perencanaan administrasi kegiatan pembangunan	Dokumen					1	1	100
				03	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan Pengoordinasian Penyelenggaraan Pengendalian Pembangunan	Dokumen			8	2			
						Jumlah laporan hasil perumusan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Dokumen					3	3	100
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah	%			98	97,16	96	97,84	101,92
				01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Dokumen			8	91,93			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen					8	8	100
				02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen	Dokumen			8	8			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengoordinasian Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen					4	4	100
				03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa	Dokumen			12	8			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang					300	300	100
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam	Rumusan / Dokumen			1	1	3	3	100
				01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, dan perikanan	Dokumen			1	1			
						Rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rumusan			3	1			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	Dokumen					1	1	100

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								
	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen			1	7			
		Rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam lingkungan hidup	Rumusan			1	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen					1	1	100
	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen			1	0			
		rumusan kebijakan di bidang sumber daya alam energi dan air	Rumusan			1	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen					1	1	100

2.1.4. Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa

Dalam Rangka dukungan terhadap pencapaian Pancakarsa, Sekretariat Daerah mengampu 2 Karsa yaitu Karsa Bogor Maju dan Karsa Bogor Berkeadaban.dengan Indikator:

1. Pelaksanaan Boling (Bogor Keliling) pada Karsa Bogor Maju dengan target pada tahun 2023 sebanyak 20 Kecamatan
2. Jumling (Jum'at Keliling) pada Karsa Bogor Berkeadaban dengan target pada tahun 2023 sebanyak 20 Kecamatan
3. Gerakan Bogor Ngaos pada Karsa Bogor Berkeadaban dengan taerget pada tahun 2023 sebanyak 100 orang
4. Bedah Pesantren pada Karsa Bogor Berkeadaban dengan target tahun 2023 sebanyak 267 Pondok Pesantren
5. Bantuan Legalitas bagi Pondok Pesantren pada Karsa Bogor Berkeadaban dengan target tahun 2023 sebanyak 50 Pondok Pesantren
6. Peningkatan Kualitas Keagamaan melalui Program Hafizd Qur'an dengan target tahun 2023 sebanyak 350 orang

Dari keenam indikator tersebut, pada tahun akhir pelaksanaan Pancakarsa tahun 2023, Sekretariat Daerah secara rata-rata telah memenuhi target hanya saja ada dua indikator yang tidak mencapai target yaitu Pelaksanaan Boling dan Bedah Pesantren.

Tidak tercapainya target pada indikator pelaksanaan Boling, dikarenakan pada saat waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dikarenakan sudah

memasuki masa kampanye. Kemudian untuk indikator Bedah Pesantren dikarenakan Pesantren yang sedianya akan menerima bantuan mengundurkan diri.

Secara rinci, dukungan terhadap pencapaian Pancakarsa, Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.**Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2023**

PANCAKARSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME REALISASI			VOLUME (TAHUN 2023)		
					2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12= (11/10) X100%
Karsa Bogor Maju										
Boling (Bogor Keliling)/ Saba Desa	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kecamatan	0	18	14	20	18	90,00%
Karsa Bogor Berkeadaban										
Jumling	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	0	0	40	20	35	175,00%
Gerakan Bogor Ngaos	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	340	0	3978	100	300	300,00%
Bedah pesantren	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pondok Pesantren	22	24		267	261	97,75%
Bantuan legalitas bagi pondok pesantren	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan	Pondok Pesantren	63	56	50	50	50	100,00%

PANCAKARSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	VOLUME REALISASI			VOLUME (TAHUN 2023)		
					2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12= (11/10) X100%
			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial							
Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Orang	0	300	350	350	350	100,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, serta memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Indikator kinerja Sekretariat Daerah adalah yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bogor dan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, kategorinya berdasarkan Indikator termaju sesuai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Secara rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah adalah 93,06% dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebesar 99,84%, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja (IKU) Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai AKIP Minimal Baik, pada tahun 2023 realisasi pada indikator ini didapatkan dengan melihat persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP minimal BAIK. Nilai AKIP Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Nilai AKIP hasil penilaian mandiri AKIP seluruh Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Realisasi pada Indikator ini adalah sebesar 93,06%

2. Indikator Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik, mendapat kategori sangat memuaskan dengan capaian sebesar 107,80%, dari target 90,28% terealisasi sebesar 97,33%. IKM merupakan salah di antara tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, pelaksanaan survei IKM telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari 4 (empat) tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat). Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. Nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	76,61-88,30	B	Baik
4	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Bogor terhadap 75 (tujuh puluh lima) perangkat daerah dan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, didapatkan hasil nilai tertinggi yaitu 99,09 dan nilai terendah yaitu 73,93 dengan persentase berkriteria baik sebesar 97,33%, dengan rincian sebagai berikut:

1. 6 (enam) perangkat daerah mendapatkan predikat sangat baik;
2. 67 (enam puluh tujuh) perangkat daerah mendapatkan predikat baik;
3. 2 (dua) perangkat daerah mendapatkan predikat kurang baik.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Menciptakan persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
 4. Mendukung pencapaian prioritas dan fokus pembangunan daerah.
3. Realisasi Indikator Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah sebesar 3,256 (Kategori Sedang) dari target sebesar 3,55 atau capaian atas indikator ini adalah sebesar 91,72%.

Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan penilaian atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal. Hal ini berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh

kepala daerah kepada pemerintah pusat, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: (1) capaian kinerja makro; (2) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (3) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan indikator kunci hasil dan indikator kunci keluaran terdiri dari 31 (tiga puluh satu) urusan:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Trantibumlinmas;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan KB;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian;
17. Koperasi dan Usaha Kecil;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan;
20. Kebudayaan;
21. Perpustakaan;
22. Kearsipan;
23. Kelautan dan Perikanan;
24. Pariwisata;
25. Pertanian;
26. Kehutanan;
27. Energi Sumber Daya Mineral;
28. Perdagangan;
29. Perindustrian;
30. Transmigrasi;
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (perencanaan dan keuangan)

Laporan LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam reviu LPPD sebagai berikut:

Tahapan dan Uraian Kegiatan Reviu LPPD		
No.	Tahap	Uraian kegiatan
1.	Perencanaan	a. Persiapan Pembentukan Tim
		b. Penyusunan Program Kerja
		c. Penyelarasan Program Kerja
		d. Pengumpulan data dan informasi
2.	Pelaksanaan	a. Penelaahan data dan dokumen
		b. Pengumpulan bukti dukung melalui desk SKPD
		c. Permintaan keterangan dengan SKPD dan Tim Penyusun LPPD
		d. Analisis
		e. Penyusunan Kertas Kerja
3.	Pelaporan	a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu
		b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu

4. Indikator Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tepat waktu/tidak tepat waktu mendapat kategori sangat memuaskan dengan capaian 100% dari target tepat waktu terealisasi tepat waktu. LKPJ Kabupaten Bogor Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Bupati Bogor kepada DPRD Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Maret 2022 melalui surat Nomor 131/848-Adbang. LKPJ merupakan laporan informasi penyelenggara pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. LKPJ Tahun 2022 merupakan

LKPJ akhir tahun anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ berisi: (1) arah kebijakan umum pemerintah daerah, memuat: visi, misi, strategi, kebijakan, prioritas daerah. (2) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, memuat: pengelolaan pendapatan daerah. (3) Penyelenggaraan urusan desentralisasi, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. (4) Penyelenggaraan tugas pembantuan, memuat tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah dan provinsi beserta permasalahan dan solusi. (5) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Penyajian LKPJ diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif, jujur, apa adanya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mempermudah DPRD memberikan rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023, analisis pencapaian kinerja utama tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9)x100%
	TUJUAN									
	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	48	64,9	64,9					
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,19	5,85	-1,77					
	Indeks Kebahagiaan	poin	67,94	67,95	74,73					
	SASARAN									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,57	84,06	86,11					
	Nilai SAKIP	predikat	B	B	B					
	Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah	%	NA	6,03	3,49					
	Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	NA	15,38	23,08					
	Kualitas penyusunan LPPD	Nilai	3,06	3,26	3,26					
	Persentase penyelesaian kasus tanah	%	70	50	79,07					
	Jumlah DOB	DOB	0	0	0					
	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan	%	119,17	100	111,19					
	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	%	13,46	100	100					
	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	rasio	100	100	100					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			REALISASI					TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9)x100%
	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti	%	100	33,33	33,33					
	Persentase kerjasama yang di implementasikan	%	161,11	100	100					
	Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD	%	97,49	99,22	97,26					
	Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76.61	%	65	80	86,11					
	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK	%	100	100	80					
	Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60	%	NA	54,84	71,68					
	Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif	%	NA	60	60					
	Persentase lembaga keagamaan yang dilayani	%	100	100	100					
	INDIKATOR TUJUAN (Tahun 2021) :									
	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	-	-	-	100	93,06	100	93,06	93,06
	INDIKATOR SASARAN (Tahun 2021) :									
	Perangkat daerah yang memiliki nilai nimalal IKM kategori baik	%	-	-	-	86,11	87,5	90,28	97,33	107,81
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	poin	-	-	-	1,43	3,26	3,55	3,2566	91,74
	Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu / Tidak tepat waktu	-	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dan sekaligus sebagai perumus kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun ke depan (2018 – 2023) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan daerah yang efektif memecahkan permasalahan pemerintahan dan pembangunan pada setiap bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
2. Kurangnya kapasitas aparatur sipil negara dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan;
3. Belum efektifnya fasilitasi dan koordinasi dalam meningkatkan kehidupan umat beragama;
4. Banyaknya produk hukum daerah yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang baru dan kebutuhan masyarakat;
5. Masih banyaknya perkara hukum yang melibatkan aparatur yang perlu difasilitasi;
6. Diperlukannya kerjasama yang efektif baik antar daerah dan pihak ketiga dalam upaya percepatan pembangunan;

7. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program pembangunan sebagai kontrol keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan;
8. Diperlukannya penataan kelembagaan Perangkat Daerah agar lebih efektif melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai bidang kewenangan yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan;
9. Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki SPM atau SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya;
10. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan terhadap pimpinan daerah dalam penyelenggaraan tugas;
11. Dinamisnya peraturan pemerintah pusat tentang pengadaan barang/jasa;
12. Kurang memadainya sarana/prasarana kerja dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
13. Masih Belum optimalnya sinergitas antara BUMD dan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat.
2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat.

Dalam tugasnya sebagai penyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu caranya yaitu dengan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dengan baik, agar perangkat daerah pengampu visi dan misi tersebut dapat terkoordinasikan dan terarah sesuai tujuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Fungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Berdasarkan Analisis Beban Kerja secara kuantitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat Daerah yang saat ini berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) orang sudah mencukupi, namun secara kualitas masih belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Aparatur baik yang menduduki jabatan struktural maupun non struktural, yang memiliki kemampuan menganalisis dan merumuskan bahan kebijakan pimpinan masih terbatas. Sehingga bahan rumusan kebijakan yang disusun belum dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan seluruh bidang urusan pemerintahan. Selain itu substansi dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan

kebijakan masih belum seluruhnya dipahami, sehingga koordinasi, sinkronisasi dan sinergi implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal;

3. Penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah setiap tahun dilakukan, namun pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana tersebut belum optimal;
4. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum seluruhnya memiliki SOP;
5. Belum optimalnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Masih adanya potensi tuntutan dan gugatan hukum atas pelayanan pemerintahan daerah dan tingginya kasus-kasus hukum yang melibatkan aparatur;
7. Masih belum optimalnya organisasi dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
8. Perusahaan daerah belum dikelola secara profesional sesuai dengan tuntutan *good corporate governance*, hal ini dapat dilihat masih adanya BUMD yang mengalami kerugian dari tahun ketahun, sehingga perlu adanya pembinaan yang menyeluruh terhadap tata kelola BUMD;
9. Belum adanya kebijakan daerah yang mendukung pelaku usaha daerah agar dapat bersaing dalam menghadapi persaingan pasar bebas baik di tingkat daerah, nasional, maupun global;
10. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;

11. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan di masyarakat;
12. Masih terdapatnya masalah kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang perlu penanganan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih terdapatnya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah yang belum memahami tugas dan fungsinya, terutama dalam memahami pentingnya koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tata hubungan kerja pada masing-masing bagian, maupun Perangkat Daerah antar Lingkup Asisten;
2. Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur yang bertugas mengelola sarana-dan prasarana;
3. Kurangnya pemahaman pentingnya disusun SOP sebagai standar pelaksanaan tugas serta kurangnya referensi SOP terkait koordinasi, fasilitasi dan kesekretariatan lainnya;
4. Masih terdapat kebijakan daerah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau suatu kelompok masyarakat, masih terdapatnya aparatur yang menyalahgunakan kewenangannya serta masih terdapatnya kelalaian administrasi sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas.
5. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang struktur Perangkat Daerah yang masih memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Masih terdapatnya penempatan aparatur pada suatu Perangkat Daerah tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
7. Masih terdapatnya perusahaan daerah/BUMD yang kinerjanya belum sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penempatan SDM pada perusahaan daerah/BUMD yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta pendanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan operasional BUMD serta belum optimalnya sinergi antara BUMD dengan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati;
8. Masih kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya akan pentingnya kebijakan daerah yang mendukung pelaku usaha daerah agar dapat bersaing dalam menghadapi persaingan pasar bebas baik di tingkat daerah, global, maupun nasional;
9. Keagamaan merupakan urusan pemerintah pusat serta lemahnya koordnasi antar *stakeholder* di daerah yang menangani masalah keagamaan;
10. Belum terinventarisasinya data sarana dan prasarana keagamaan di daerah secara akurat;
11. Belum meratanya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan di daerah.

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan tabel berikut ini:

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Perlu ditingkatkan nya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Belum maksimalnya pendampingan pengelolaan AKIP Perangkat Daerah
			Belum maksimalnya penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur
2	Belum Optimalnya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat belum berjalan baik
			Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Distribusi, Pengendalian, Evaluasi terkait Perekonomian
			Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Kebijakan Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
			Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Sumber Daya Alam
			Belum maksimalnya koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi terkait urusan Administrasi Umum

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Sekretariat Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab untuk membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dalam RKPD Sekretariat Daerah 2024 semua program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah sudah terakomodir, hanya saja dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan rencana pagu renja 2024 yang tersedia.

Ketidaksesuaian pagu ini antara lain adalah:

1. Pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Hibah sarana dan prasarana; (2) Kegiatan Tahfidz Qur'an; (3) Kegiatan MTQ; dan (4) Kegiatan penyelenggaraan Haji.
2. Pada sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Pelaksanaan desk Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan (2) Kegiatan Workshop Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Pada sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Pelaksanaan bimtek sertifikasi PPK; (2) Pelaksanaan bimtek sertifikasi PBJ level 1; dan (3) Kegiatan pendampingan persiapan audit ISO.
4. Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Belanja sewa kursi; (2) Belanja sewa tenda; (3) Belanja Karangan Bunga; dan (4) Belanja Bahan Bakar Minyak lingkup Sekretariat Daerah.
5. Pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Pengadaan Kendaraan Dinas KDH; dan (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah.
6. Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, masih belum memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan: (1) Pemeliharaan Gedung Kantor Bupati; (2) Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati; (3) Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah; (4) Pemeliharaan Rumah Dinas KDH/WKDH; dan (5) Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

Adanya ketidaksesuaian pagu pada sub kegiatan di atas dianalisa berdasarkan capaian realisasi sub kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya dan juga adanya tuntutan atas terbitnya peraturan baru terkait pengadaan barang/jasa.

Secara rinci, gap/selisih antara kebutuhan anggaran dan pagu Sekretariat Daerah Tahun 2024 tertuang pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN BOGOR

URUSAN / UNSUR : Pendukung

BIDANG URUSAN : Sekretariat Daerah

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan yang berkualitas	Kab.Bogor	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah	poin	69,38	171.932.605.132	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan yang berkualitas	Kab.Bogor	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah	poin	69,38	171.932.605.132	
	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Kab.Bogor	Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	90,58		Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Kab.Bogor	Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	90,58		
	Tercapainya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target	Kab.Bogor	Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi	%	100		Tercapainya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target	Kab.Bogor	Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi	%	100		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	%	100	35.469.217.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	%	100	35.469.217.000	
		Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100			Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100		
	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan	4	2.173.924.000	1. Administrasi Tata Pemerintahan	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan	4	2.173.924.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	1.279.566.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	5	1.279.566.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	455.726.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	455.726.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	438.632.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3	438.632.000	
	2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan	Produk Hukum	395	1.666.474.000	2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan	Produk Hukum	395	1.666.474.000	
		Kab.Bogor	Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya	Perkara	45			Kab.Bogor	Jumlah Perkara yang dibantu penyelesaiannya	Perkara	45		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	783.359.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	395	783.359.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	35	537.850.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	35	537.850.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	345.265.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab.Bogor	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	395	345.265.000	
	3. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan	Kerjasama	34	242.385.000	3. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dihasilkan	Kerjasama	34	242.385.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	34	178.321.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	34	178.321.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	0	-	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	0	-	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	27	64.064.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	27	64.064.000	
	4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	3	31.386.434.000	4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	3	31.386.434.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	15.435.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	15.435.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	5	13.888.681.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	5	13.888.681.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	6	2.062.753.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	6	2.062.753.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab.Bogor	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	%	100	14.204.682.000	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kab.Bogor	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	%	100	14.204.682.000	
		Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100			Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Perekonomian dan Pembangunan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100		
	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan/Dokumen	3	1.331.720.000	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan/Dokumen	3	1.331.720.000	
		Kab.Bogor	Jumlah BUMD yang sehat	BUMD	4			Kab.Bogor	Jumlah BUMD yang sehat	BUMD	4		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	436.114.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	436.114.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	459.492.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	459.492.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	436.114.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	436.114.000	
	2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam	Rumusan / Dokumen	3	800.064.000	2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam	Rumusan / Dokumen	3	800.064.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	541.090.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	541.090.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	135.301.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	135.301.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	123.673.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	123.673.000	
	3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	3	3.492.413.000	3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Dokumen	3	3.492.413.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasitai Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	3	1.141.389.000	Fasilitasitai Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasitai Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	3	1.141.389.000		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	773.943.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	773.943.000		
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.577.081.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.577.081.000		
	4. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah	%	98	8.580.485.000	4. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah	%	98	8.580.485.000		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	8	3.152.061.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	8	3.152.061.000		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	8	2.131.853.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	8	2.131.853.000		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	3.296.571.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	3.296.571.000		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bogor	Persentase Kebijakan di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana	%	100	122.258.706.132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bogor	Persentase Kebijakan di bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang terlaksana	%	100	122.258.706.132		
		Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penunjang urusan pemerintahan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100			Kab.Bogor	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup penunjang urusan pemerintahan dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100			
		Kab.Bogor	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100			Kab.Bogor	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100			
	1. Penataan Organisasi	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	13	1.452.291.000	1. Penataan Organisasi	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	13	1.452.291.000		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	8	448.069.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	8	448.069.000		
	Fasilitasitai Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasitai Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	159.720.000	Fasilitasitai Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasitai Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3	159.720.000		
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	263.465.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	3	263.465.000		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	207.873.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	207.873.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	373.164.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	373.164.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	491.837.000	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	491.837.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	163.674.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	163.674.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen RKA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	80.891.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen RKA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	80.891.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	32.285.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	32.285.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	32.370.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	32.370.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	33.979.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Sekretariat Daerah	Dokumen	1	33.979.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	3	95.147.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	3	95.147.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	53.491.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	53.491.000	
	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Dokumen	10	61.929.292.000	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Dokumen	10	61.929.292.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	61.433.898.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	300	61.433.898.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen	2	176.471.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen	2	176.471.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Daerah	Dokumen	2	106.879.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Daerah	Dokumen	2	106.879.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah	Laporan	16	68.583.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sekretariat Daerah	Laporan	16	68.583.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	30.212.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	30.212.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Laporan	1	113.249.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Laporan	1	113.249.000		
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersedia	Dokumen	30	12.444.195.000	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang tersedia	Dokumen	30	12.444.195.000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.316.010.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1.316.010.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4.733.932.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4.733.932.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.369.247.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.369.247.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.025.006.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.025.006.000		
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang Terselenggara	Dokumen	9	25.201.184.100	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Umum Sekretariat Daerah yang Terselenggara	Dokumen	9	25.201.184.100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	209.420.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	209.420.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	14.036.289.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	14.036.289.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.076.648.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.076.648.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	209.637.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Bogor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	209.637.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2.625.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2.625.000.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.711.172.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.711.172.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	Dokumen	1	333.018.100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Sekretariat Daerah	Dokumen	1	333.018.100	
	6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	9	-	6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	9	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab.Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Pengadaan Kendaraan Dinas	Kab.Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket		-	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bogor	Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Dokumen	5	9.781.387.000	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Bogor	Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Dokumen	5	9.781.387.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	657.689.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	657.689.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	256	1.026.585.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	256	1.026.585.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab.Bogor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	105.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab.Bogor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	105.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.992.113.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.992.113.000	
	8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani	Dokumen	4	6.681.661.032	8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani	Dokumen	4	6.681.661.032	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	24	1.355.743.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	24	1.355.743.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Kab.Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Paket	12	196.934.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Kab.Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Paket	12	196.934.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	192.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	192.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	12	4.936.984.032	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	12	4.936.984.032	
	9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab.Bogor	Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terselenggara	Dokumen	3	1.325.549.000	9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab.Bogor	Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang terselenggara	Dokumen	3	1.325.549.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	667.965.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	667.965.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	378.984.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	378.984.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	278.600.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	278.600.000	
	10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen	2	2.267.793.000	10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen	2	2.267.793.000	
	Fasilitas Keprotokolan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	1	1.494.744.000	Fasilitas Keprotokolan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	1	1.494.744.000	
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	427.784.000	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	427.784.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	40	345.265.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	40	345.265.000	
	11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Dokumen	8	659.668.000	11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Dokumen	8	659.668.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	241.876.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab.Bogor	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	241.876.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	237.632.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	237.632.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	69.910.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	69.910.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	110.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	110.250.000	
	12. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	Dokumen	3	23.849.000	12. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Bogor	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	Dokumen	3	23.849.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1.455.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sekretariat Daerah	Dokumen	1	1.455.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	5.930.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan	1	5.930.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	16.464.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	16.464.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka perumusan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025, telah dilakukan Forum Perangkat Daerah (PD) yang juga merupakan tahapan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, hanya saja dari hasil pelaksanaan Forum PD tersebut tidak ada usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan. Usulan terkait Program/Kegiatan para pemangku kepentingan lebih ditujukan kepada Dinas Teknis yang terkait.

Adapun pada Sekretariat Daerah usulan yang masuk merupakan usulan aspirasi terkait hibah sarana dan prasarana keagamaan dan hibah Lembaga keagamaan yang masuk ke dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat pada Sekretariat Daerah diperoleh melalui input usulan aspirasi di aplikasi SIPD-RI pada bulan Maret 2024. Dari usulan yang masuk penerima hibah yaitu sebanyak 7 (tujuh) lembaga keagamaan dan 140 (seratus empat puluh) usulan hibah sarana dan prasarana keagamaan, dengan rincian diantara yaitu :

1. Hibah sarana dan prasarana pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental sebesar Rp6.490.000.000,-;
2. Hibah Lembaga keagamaan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial sebesar Rp5.720.000.000,-.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Hibah tersebut ada pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Pelaksanaan Kebijakan Rakyat, Kegiatan Kesejahteraan

Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dimana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bogor

Tabel 2.5

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	%	100	
			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Pencapaian Kinerja kategori tinggi	%	100	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Bogor	Jumlah Rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	Dokumen	3	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	1. MUI 2. LPTQ 3. BAZNAS 4. BWI 5. DMI 6. PUI 7. PCNU
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	5	1. Pondok Pesantren/Majlis Ta'lim sebanyak 123 Penerima Hibah (Rp.5.050.000.000) 2. Masjid dan Mushola sebanyak 17 Penerima Hibah (Rp.670.000.000)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Propinsi Jawa Barat dengan kewenangan perangkat daerah dengan mempedomani program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah untuk Tahun 2024-2026.

Berdasarkan target capaian strategis Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Adapun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi referensi antara lain:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada upaya pencapaian sasaran:
 - a. meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
 - b. meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
 - c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan;
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;
 - e. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

2. Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 pada upaya pencapaian sasaran:
 - a. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima.
3. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 pada upaya pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1, sedangkan keterkaitan dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2, dan dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perekonomian dan Pembangunan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian Pembangunan	Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	10	Rumusan	14.204.682.000
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-	-	-	-	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	-	-	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Rumusan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesra yang Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Bogor	Rumusan kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	16	Dokumen	35.469.217.000
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	-	-	-	-	-	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	-	-	-	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Integritas Ekonomi Domestik dan Gobl	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terfasilitasi	100	%	122.258.706.132

Tabel 3.2**Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Reformasi Sistem Kesehatan	-	-	-	-	-	-
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Perekonomian dan Pembangunan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian Pembangunan	Rumusan Kebijakan Di Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	10	Rumusan	14.204.682.000
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-
4	Reformasi Sistem Perindungan Sosial	-	-	-	-	-	-
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana	-	-	-	-	-	-

III-5

7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terfasilitasi	100	%	122.258.706.132
8	Gerakan Membangun Desa	-	-	-	-	-	-
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Rumusan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesra yang Mendukung Pembangunan Di Kabupaten Bogor	Rumusan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	16	Dokumen	35.469.217.000
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Melaksanakan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyiapan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyusunan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan Kebijakan, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu perangkat daerah, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi.

Berdasarkan Tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 selanjutnya dijabarkan dengan memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, yaitu: tujuan Kabupaten “Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik” dengan sasaran “Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah” dan “Meningkatkan pelayanan kewenangan daerah”.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan Yang Berkualitas

Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas;
2. Tercapainya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025, diukur dengan menggunakan indikator Tujuan dan indikator Sasaran Tahun 2025 yang dapat terlihat pada Tabel 3.4 berikut ini:

III-9
Tabel 3.4

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan Yang Berkualitas	Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah	Total nilai AKIP perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah	69,38	Nilai
SASARAN 1 :	Terwujudnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM kategori baik atau lebih tinggi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	90,58	%
SASARAN 2 :	Tercapainya Realisasi Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi	Jumlah perangkat daerah dengan ketercapaian kinerjanya kategori tinggi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	100%	%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program prioritas pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026, Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026.

Dalam tugasnya sebagai penyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan isu-isu strategis kabupaten Bogor. Salah satu caranya yaitu dengan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, agar perangkat daerah pengampu isu-isu strategis tersebut dapat terkoordinasikan dan terarah sesuai tujuan.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, dalam lingkup 4 (empat) Bagian (Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat) di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan rencana anggaran sebesar Rp35.469.217.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp2.173.924.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pemerintahan;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp1.666.474.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp242.385.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
 4. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp31.386.434.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dalam lingkup 4 (empat) Bagian (Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang Jasa) di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan rencana anggaran sebesar Rp14.204.682.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dilakukan oleh Bagian Perekonomian, dengan anggaran sebesar Rp1.331.720.000,-
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp3.492.413.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp8.580.485.000,-.
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp800.064.000,-
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, yang dilaksanakan dalam lingkup 4 (empat) Bagian (Bagian Perencanaan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) dibawah Asisten Administrasi Umum, dengan rencana anggaran sebesar Rp122.258.706.132,- dengan rinciannya sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penataan Organisasi, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, dengan anggaran sebesar Rp1.452.291.000,-
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp491.837.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp61.929.292.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp12.444.195.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp25.201.184.100,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,-
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp9.781.387.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp6.681.661.032,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp1.325.549.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- 10. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp2.267.793.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- 11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Umum, dengan anggaran sebesar Rp659.668.000,-
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 12. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp23.849.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
 - c. Sub Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Adapun Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bagian Tata Pemerintahan	1	1	3	2.173.924.000
Bagian Perundang - Undangan	1	1	2	1.128.624.000
Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum	1	2	3	780.235.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	31.386.434.000
Bagian Perekonomian	1	1	3	1.331.720.000
Bagian Sumber Daya Alam	1	1	3	800.064.000
Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	3.492.413.000
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	8.580.485.000
Bagian Perencanaan Keuangan	1	4	16	71.425.028.032
Bagian Organisasi	1	1	5	1.452.291.000
Bagian Umum	1	8	26	46.916.660.100
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	2	4	2.464.727.000

Catatan: dari 24 Kegiatan diatas terdapat Kegiatan yang diampu 2 atau 3 bagian, sehingga Kegiatan hanya sebanyak 20 Kegiatan

BAB V

P E N U T U P

Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

